



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:

1. Pendapatan:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	815.664.188.996,50
b. Dana Perimbangan	Rp	1.908.970.208.199,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	RP	6.857.420.256,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.731.491.817.451,50
2. Belanja:		
a. Belanja Operasi	Rp	1.629.460.884.903,74
1). Belanja Pegawai	Rp	714.859.072.319,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	837.011.356.496,74
3). Belanja Subsidi	Rp	13.973.868.842,00
4). Belanja Hibah	Rp	63.154.227.474,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	462.359.772,00
b. Belanja Modal	Rp	496.619.274.367,07
1). Belanja Modal Tanah	Rp	51.978.879.050,00
2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	134.331.790.579,07
3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	239.046.835.735,00
4). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	67.684.064.690,00
5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	3.577.704.313,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	923.172.706,00
d. Belanja Transfer	Rp.	426.574.659.154,21
1). Belanja Bagi Hasil	Rp.	244.301.809.158,00
2). Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	182.272.849.996,21
Jumlah Belanja	Rp	2.553.577.991.131,02
Surplus / (Defisit)	Rp	177.913.826.320,48
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	246.200.110.390,87
b. Pengeluaran	Rp	15.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	231.200.110.390,87
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)	Rp	409.113.936.711,35

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

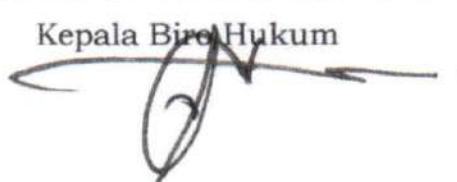
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 22 September 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2023

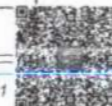
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

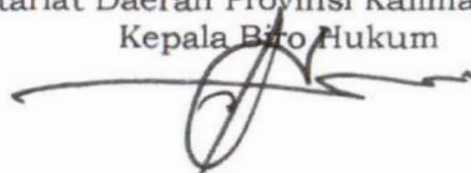
Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.553.547.049.717,00	2.731.491.817.451,50	177.944.767.734,50	106,97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	717.137.755.259,00	815.664.188.996,50	98.526.433.737,50	113,74
4.1.01	Pajak Daerah	505.227.578.248,00	596.780.850.288,00	91.553.272.040,00	118,12
4.1.02	Retribusi Daerah	8.500.000.000,00	7.053.749.876,00	(1.446.250.324,00)	82,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.088.203.219,00	9.088.203.219,39	0,39	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	194.321.973.792,00	202.741.385.813,11	8.419.412.021,11	104,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.836.059.294.458,00	1.908.970.208.199,00	72.910.913.741,00	103,97
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.836.059.294.458,00	1.908.970.208.199,00	72.910.913.741,00	103,97
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	6.857.420.256,00	6.507.420.256,00	1.959,26
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00	5.776.633.300,00	5.426.633.300,00	1.650,47
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.080.786.956,00	1.080.786.956,00	0
5	BELANJA DAERAH	2.801.824.143.511,00	2.553.577.991.131,02	(248.246.152.379,98)	91,14
5.1	BELANJA OPERASI	1.743.947.173.123,00	1.629.460.884.903,74	(114.486.288.219,26)	93,44
5.1.01	Belanja Pegawai	753.427.506.803,00	714.859.072.319,00	(38.568.434.484,00)	94,88
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.741.031.168,00	837.011.356.496,74	(75.729.674.671,26)	91,70
5.1.04	Belanja Subsidi	15.973.945.925,00	13.973.868.842,00	(2.000.077.083,00)	87,48
5.1.05	Belanja Hibah	61.279.489.227,00	63.154.227.474,00	1.874.738.247,00	103,06
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	525.200.000,00	462.359.772,00	(62.840.228,00)	88,03
5.2	BELANJA MODAL	624.908.274.645,00	496.619.274.367,07	(128.289.000.277,93)	79,47
5.2.01	Belanja Modal Tanah	92.054.062.518,00	51.978.879.050,00	(40.075.183.468,00)	56,47
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.189.256.495,00	134.331.790.579,07	(62.837.465.915,93)	68,13
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.402.195.366,00	239.046.835.735,00	(21.355.359.631,00)	91,80
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.494.930.181,00	67.684.064.690,00	(3.810.865.491,00)	94,67
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.787.830.065,00	3.577.704.313,00	(210.125.752,00)	94,45
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.550.000.000,00	923.172.706,00	(2.626.827.294,00)	26,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.550.000.000,00	923.172.706,00	(2.626.827.294,00)	26,00
5.4	BELANJA TRANSFER	429.418.695.743,00	426.574.659.154,21	(2.844.036.588,79)	99,34
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	247.045.845.743,00	244.301.809.158,00	(2.744.036.585,00)	98,89
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	182.372.850.000,00	182.272.849.996,21	(100.000.003,79)	99,95
	SURPLUS / DEFISIT	(248.277.093.794,00)	177.913.826.320,48	426.190.920.114,48	0



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	263.110.709.795,00	246.200.110.390,87	(16.910.599.404,13)	93,57
6.1.01		263.110.709.795,00	246.200.110.390,87	(16.910.599.404,13)	93,57
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	248.110.709.795,00	231.200.110.390,87	(16.910.599.404,13)	93,18
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(166.383.999,00)	409.113.936.711,35	409.280.320.710,35	0

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
 NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

